**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pentingnya pengaturan dan kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 2) Untuk mengetahui implikasi hubungan kerja eksekutif dan legislatif dalam menjalankan hubungan kerja sesuai dengan mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang akan dibahas adalah : 1) Bagaimana arti pentingnya kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 2) Bagaimana mekanisme rekrutmen calon kepala daerah dalam menjalin hubungan kerja antara Eksekutif dan Legislatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan tipe penelitian yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara mengiventarisasi, mensistematisasi, dan mengimprestasikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Kepala daerah adalah merupakan penentu arah kebijakan pada suatu daerah, memiliki wewenang yang sangat penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan kepala daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting dalam upaya pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastuktur, dan peningkatan keuangan daerah. 2) Retrumen kepala daerah yang di atur oleh undang-undang memiliki dua sistem, pertama melalui jalur partai politik, kedua melalui jalur peseorangan (independen). Kepala daerah yang disebut lembaga eksekutif memiliki mitra kerja dengan DPRD yang disebut dengan lembaga legislatif, dalam menjalankan aktivitas keperintahan kedua lembaga ini memiliki peran yang sama-sama penting untuk menetukan kebijakan pemerintah. Hubungan kerja dua lembaga ini bisa berjalan harmonis juga bisa tidak harmonis. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan : Eksekutif dan Legilatif merupakan lembaga Negara yang memiliki peran penting dalam menjalanakn roda pemerintah pusat maupun daerah, maka peran itu harus selalu tercipta harmonis agar bisa menciptakan kebijakan yang meakomodir semua kepentingan masyarakat, hendaknya kedua lembaga ini tidak saling bertentangan ketika dalam nenetukan kebijakan, hendaknya lembaga ini mengendepankan asas musyawarah, baik yang sebagai kepala daerah maupun DPRD, baik yang berstatus anggota partai politik maupun yang tidak berstatus anggota partai politik.

**Kata Kunci : Peran Kepala Daerah, Rekrutmen, Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif.**

**ABSTRACT**

This study aims 1) To determine the importance of the role of regional heads in carrying out regional development. 2) To find out the implications of the working relationship between the executive and the legislature in carrying out a working relationship in accordance with the recruitment mechanism for prospective regional heads. With these objectives, the problems to be discussed are: 1) What is the importance of the position of regional heads in regional development. 2) What is the mechanism for recruiting candidates for regional heads in establishing a working relationship between the Executive and the Legislature. While the research method used is a normative legal method with a normative juridical research type that examines legal principles, legal systematics, legal synchronization levels, legal comparisons and legal history. The approach used in this research is a conceptual approach, a statutory approach, and a historical approach. The analysis of the collected legal materials is carried out by taking inventory, systematizing, and impregnating. The results of this study indicate that: 1) The regional head is a determinant of policy direction in an area, has a very important role in efforts to create community welfare. The position of regional heads has a very strategic and important function in regional development efforts, such as infrastructure development, and increasing regional finances. 2) Retrument of regional heads regulated by law has two systems, first through political parties, second through individual (independent) channels. The regional head, which is called the executive agency, has a working partner with the DPRD, which is called the legislative body. In carrying out administrative activities, these two institutions have an equally important role in determining government policies. The working relationship of these two institutions can be harmonious or not. From the results of this study it is recommended: The Executive and Legislative are state institutions that have an important role in running the wheels of central and local government, so that role must always be created in harmony in order to create policies that accommodate all the interests of the community, these two institutions should not conflict with each other when in In determining policies, this institution should prioritize the principle of deliberation, both as regional heads and DPRD, both those who are members of political parties and those who are not members of political parties.

**Keywords: Role of Regional Heads, Recruitment, Executive and Legislative Work Relations.**